

Social Assessment

1. **Penerima Hibah:** IDEP Foundation
2. **Nomor Hibah:** CEPF-108955
3. **Judul Program:** Sustainable Livelihood & Agroforestry for Conservation of Biodiversity in Aketajawe Lolobata National Park Terrestrial Corridor
4. **Tanggal Program:** Juni 2018 – Oktober 2019
5. **Program Value** US \$84,967
6. **Lokasi Program:** Desa Pintatu & Desa Tomares - Kecamatan Wasile Selatan; Desa Tutuling Jaya & Desa Dodaga - Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur - Provinsi Maluku Utara
7. **Tanggal Tulis Document:** 26 April 2018

8. Masyarakat Adat Terpengaruh

Masyarakat Tobelo Dalam adalah suku asli Halmahera, mempraktekkan pola kehidupan semi-nomaden disekitar (buffer zone) dan didalam dikawasan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Taman Nasional Aketajawe-Lolobata sendiri merupakan suatu kawasan konservasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui kementerian kehutanan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 397/Menhut-II tahun 2004 dengan luas mencapai 167.300 hektar yang terbagi atas dua blok yakni blok Aketajawe seluas 77.100 hektar dan blok Lolobata seluas 90.200 hektar. Kawasan konservasi ini mencakup tiga wilayah administrasi pemerintah yakni Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Sebagai sebuah kawasan konservasi, alasan penunjukan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata diharapkan dapat mendukung ekosistem dan upaya pelestarian keragaman hayati di Maluku Utara dan alasan lain penunjukan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata juga berkaitan dengan keberadaan habitat hidup suku Tobelo Dalam.

Masyarakat Maluku Utara pada umumnya, pemerintah dan beberapa kalangan sering menyebut Komunitas ini dengan suku "Tuguti/Togutil". Namun istilah masih sulit untuk dilacak maknanya, mungkin saja istilah ini disematkan oleh orang luar terhadap komunitas ini bahkan penyematan ini berkonotasi negatif didasarkan pada pandangan stereotip. Menganggap komunitas ini bodoh, kotor, tidak beradab, animis, tuna budaya dan sebutan lainnya yang sepadan.

Dengan sistem pengetahuan mengenai lingkungan (alam) hutan yang dimiliki, masyarakat yang hidup dengan pola semi-nomadik itu menafsirkan dan mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang tersedia. Masyarakat tradisional memiliki karakter yang membatasi diri dan mengidentikkan diri mereka sebagai sebuah kelompok kecil yang memiliki otoritas dalam menempati sebuah wilayah tertentu berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konvensional (Aman, 2008). Jadi, masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya.

Secara umum Masyarakat Tobelo Dalam tersebar disebagian besar wilayah kepulauan Halmahera terutama di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Hamahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada di daratan Halmahera. Terdapat beberapa kelompok Masyarakat Tobelo Dalam teridentifikasi berada di daerah enclave Taman Nasional

Aketajawe-Lolobata seperti di sekitar Sungai Tayawi, Sungai Kobe dan Akejira (Blok TN Aketajawe) Sungai Onat, Sungai Dodaga, Sungai Lili, Sungai Akelamo, Sungai Pumlanga, dan Sungai Gogaili (Blok TN Lolobata 2) . Kehidupan Masyarakat Tobelo Dalam masih sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Hutan merupakan rumah utama mereka, tempat melakukan semua aktivitas seperti berburu, meramu, mencari ikan dan aktivitas lainnya.

Ciri paling khas dari kelompok berburu meramu adalah memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam secara tradisional demi kelangsungan hidup kelompoknya dari waktu ke waktu. Salah satu mata pencaharian andalan mereka adalah berburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan dan menggunakan sagu sebagai sumber karbohidratnya.

Bagi komunitas Tobelo Dalam berladang merupakan kegiatan yang dilakukan seadanya karena berladang mulanya hanya untuk kebutuhan makan seperti pisang, ubi jalar, keladi, pisang dan dalam rangka pemenuhan karbohidrat selain sagu. Namun, dalam perkembangan selanjutnya menanam kelapa dan pala menjadi mata pencaharian utama masyarakat Tobelo Dalam di lokasi penelitian. Kelapa yang diolah menjadi kopra merupakan andalan Halmahera sehingga kemungkinan besar komunitas Tobelo Dalam melakukan adaptasi setelah melihat keuntungan penjualan kopra.

Selain mata pencaharian utama itu, pada waktu-waktu tertentu terutama laki-laki juga sering mencari uang dengan menjadi buruh di perusahaan atau orang luar, menangkap burung terutama jenis burung paruh bengkok (Kakatua Putih dan Kasturi Ternate) untuk dijual, berburu telur burung maleo, menambang emas, mencari gaharu dan pekerjaan serabutan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dengan waktu yang sulit untuk ditentukan.

Seiring dengan perjalanannya waktu dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat luar, Masyarakat Tobelo Dalam telah mengalami sedikit pergeseran kebiasaan hidup. Pergeseran tersebut diantaranya adalah sebagai mereka telah mengenal pola hidup menetap, telah mengenal agama, bertambahnya sumber mata pencaharian dengan berkebun walaupun masih sangat sederhana. Selain itu mereka juga telah mengenal uang sebagai alat tukar/transaksi barang/jasa, mereka juga telah mengenal dan menggunakan serta beradaptasi dengan alat teknologi modern seperti handphone, sepeda motor, televisi, radio, CD Players, parabola dan lain sebagainya.

Dalam pencarian bahan makanan dan uang laki-laki bertanggung jawab dalam usaha pokok memukul sagu, berburu, menangkap ikan, mencari gaharu, damar, menangkap burung untuk dijual dan beberapa aktivitas ekonomi lainnya termasuk memanen kebun kelapa menjadi kopra sedangkan perempuan bekerja khususnya lebih pada ekonomi domestik mengumpulkan buah, sayur, memelihara kebun termasuk mengasuh dan merawat anak. Sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan masyarakat Tobelo Dalam pada prinsipnya sebagai cara pendistribusian hasil kerja, selain itu sebagai usaha untuk menempatkan setiap orang kedalam proses kerja itu sendiri.

Dewasa ini sebagian mereka hidup dan tinggal menetap bersama orang desa di pesisir atau kawasan hutan dekat pantai, sebagiannya mengikuti program pemukiman kembali (resettlement) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta, dan sebagiannya lagi masih tetap tinggal dan hidup serta berpindah-pindah yang bersifat sementara jauh di pedalaman baik didalam maupun disekitar kawasan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.

Masyarakat Tobelo Dalam telah mengalami fase perubahan yang begitu panjang. Harus diakui bahwa perubahan sosial adalah hal yang tidak terhindarkan bagi seluruh peradaban umat manusia dimuka

bumi ini, termasuk masyarakat Tobelo Dalam. Bahwa kebudayaan adalah cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap survive. Jika lingkungan berubah, maka budaya tentunya juga ikut berubah agar manusia pendukung budaya itu bisa tetap hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tentunya akan membawa dampak atau konsekuensi positif maupun negatif. Konsekuensi-konsekuensi tersebut harus diketahui oleh pihak pengelola Taman Nasional.

Seperti umumnya perkembangan suatu masyarakat, setelah hidup dengan cara berpindah-pindah sebagai peladang dan pemburu, masyarakat Tobelo Dalam akhirnya menetap dan memilih hidup dengan bercocok tanam. Di tempat permukiman baru itulah masyarakat ini membangun kehidupannya. Pola hidup yang baru ini akhirnya melahirkan pranata-pranata sosial yang baru pula, yang diharapkan dapat mengatur kehidupan bersama secara harmonis.

Hal pokok yang harus diketahui dan dipegang adalah untuk melakukan perubahan-perubahan positif pada masyarakat Tobelo Dalam dengan mengenal dan memahami kebudayaan Masyarakat Tobelo Dalam. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu kajian etnografi sebagai upaya untuk memahami dan mengenal kebudayaan masyarakat Tobelo Dalam di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional. Hal ini diperlukan agar memudahkan dalam memberi informasi positif sehingga perubahan kebudayaan masyarakat Tobelo Dalam cenderung kearah yang lebih baik dapat diwujudkan.

9. Latar Belakang Program/ Ringkasan proyek

Proses penentuan kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata dimulai pada tahun 1981 berdasarkan Rencana Konservasi Nasional Indonesia yang mengusulkan pembentukan empat kawasan lindung di Halmahera, yaitu Aketajawe, Lolobata, Saketa dan pegunungan Gamkonora. Pada tahun 1995, wilayah Aketajawe dan Lolobata dan hampir semua kawasan hutan di dalamnya diusulkan menjadi Taman Nasional. Dalam perkembangannya, pada tahun 2014 kawasan hutan lindung di Aketajawe yang terletak di Halmahera Tengah dan Kepulauan Tidore memiliki luas sebesar ± 77.100 Ha. Sedangkan di Lolobata, total kawasan hutan memiliki luas sebesar ± 90.200 Ha yang terdiri dari: hutan lindung ± 76.457 Ha, hutan produksi ± 7,650 Ha, dan hutan produksi permanen ± 6.075 Ha yang terletak di Halmahera Timur, Maluku Utara. Tanggal 18 Oktober 2004, dua wilayah ini (Aketajawe dan Lolobata) dengan total area 167.300 Ha diubah menjadi Taman Nasional Aketajawe Lolobata berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 397 / Kpts-II / 2004.

Sebagai 'praktik normal' yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, pemetaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata ini tidak melibatkan masyarakat lokal. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di zona penyangga Taman Nasional itu berasal dari proyek transmigrasi pada tahun 1990-an. Beberapa lahan produktif mereka kemudian tiba-tiba 'diambil' sebagai Taman Nasional diikuti dengan pelarangan untuk mengolah tanah-tanah itu lagi

[https://www.google.com/url?q=http://jikti.bakti.or.id/updates/persepsi-masyarakat-terhadap-taman-nasional-aketajawe-lolobata-](https://www.google.com/url?q=http://jikti.bakti.or.id/updates/persepsi-masyarakat-terhadap-taman-nasional-aketajawe-lolobata-di&sa=D&ust=1519809001655000&usq=AFQjCNG4NeD922m0AIFHTKnCjgXb6tHGbw)

[di&sa=D&ust=1519809001655000&usq=AFQjCNG4NeD922m0AIFHTKnCjgXb6tHGbw](https://www.google.com/url?q=http://jikti.bakti.or.id/updates/persepsi-masyarakat-terhadap-taman-nasional-aketajawe-lolobata-di&sa=D&ust=1519809001655000&usq=AFQjCNG4NeD922m0AIFHTKnCjgXb6tHGbw)). Hal itu didasarkan pada zonasi yang dikeluarkan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL). Ada beberapa desa yang bersentuhan langsung dengan Peta Zonasi Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Di kawasan Taman Nasional Lolobata ada Desa Tutuling Jaya dan Desa Dodagga (Kecamatan Wasile Timur). Sedangkan di kawasan Aketajawe ada Desa Pintatu dan Desa Tomares (Kecamatan Wasile Selatan).

Desa Pintatu - Kecamatan Wasile Selatan

Desa Pintatu terletak di bagian timur laut hutan Aketajawe yang termasuk TNAL. Desa ini dihuni masyarakat yang mencapai total populasi sebanyak 867 orang. Karena memiliki akses ke pantai, penduduk desa banyak terlibat dengan aktivitas di laut.

Desa Tomares - Kecamatan Wasile Selatan

Desa Tomares yang berpenghuni 587 orang adalah desa tetangga Pintatu. Desa ini memiliki banyak potensi terkait pengembangan hortikultura dan akuakultur.

Desa Tomares dan Pintatu merupakan pusat singkong dan damar. Penduduknya kebanyakan fokus pada produk non-kayu hutan dan telah menerapkan praktik agroforestri sampai taraf tertentu. Namun demikian, mereka masih memiliki kelemahan dalam hal perencanaan yang terkait dengan pengembangan dan diversifikasi, baik yang terkait dengan kegiatan mata pencaharian maupun produk yang dihasilkan. Sebagian wilayah Desa Pintatu dan Tomares berada di daerah pesisir yang sudah ditanami bakau. Terkait itu, sebenarnya ada banyak produk yang dapat dihasilkan dari hutan bakau. Dan karena itu, masyarakat akan mendapat manfaatnya jika dibekali dengan informasi dan pengetahuan tentang cara memulai dan menumbuhkan komoditas ini secara berkelanjutan.

Desa Tutuling Jaya - Kecamatan Wasile Timur

Desa Tutuling Jaya, yang merupakan desa terluas di antara desa-desa lain di Wasile Timur, adalah desa yang dihuni campuran penduduk asli dan pendatang dengan total populasi sebanyak 1516 orang. Dari total itu, sedikitnya ada 40 penduduk asli (suku Tobelo Dalam) yang sebelumnya tinggal di hutan namun kini dilaporkan tinggal di desa.

Desa Dodaga - Kecamatan Wasile Timur

Dibandingkan dengan Tutuling Jaya, Desa Dodaga berpenduduk lebih padat dengan total populasi 2.215 orang. Namun mirip Tutuling Jaya, Dodaga juga dihuni campuran antara penduduk lokal dan transmigran yang hidup berdampingan.

Tutuling Jaya dan Dodaga dihuni sebagian besar masyarakat adat yang telah dipindahkan ke kawasan zona penyangga. Di situ, mereka disediakan rumah dan lahan pertanian oleh pemerintah daerah. Komoditas yang mereka hasilkan adalah: bawang merah dan sayuran. Selain itu, sebenarnya masih ada berbagai komoditas seperti cengkeh dan pala yang dapat dikembangkan di kedua desa ini. Dengan potensinya sebagai kawasan pertanian, daerah ini memiliki peluang untuk mengembangkan produk lokal pasca panen.

Keempat desa ini terletak di kawasan zona penyangga Taman Nasional yang boleh digunakan untuk ekowisata dan atau jasa layanan terkait lingkungan lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kami menemukan bahwa ada beberapa tantangan, secara khusus dalam aspek sosial-ekonomi, yang dihadapi komunitas ini ketika ingin mengurangi ancaman terhadap upaya konservasi Taman Nasional:

Kurangnya kesadaran tentang konservasi, khususnya pada fungsi dan batas desa dan Taman Nasional

Meskipun sebagian besar masyarakat lokal tinggal di zona penyangga Taman Nasional, namun pemahaman mereka tentang peta zonasi masih terbatas. Sebagian penduduk masih memiliki persepsi bahwa tanah yang kini mereka manfaatkan itu merupakan warisan leluhur. Atas dasar itu, tanah tersebut masih menjadi milik mereka dan karena itu bisa mereka gunakan untuk apa pun yang mereka mau. Bentrokan pun tidak bisa dihindari ketika pihak berwenang (atau penjaga hutan) datang untuk memberi pemahaman tentang peta zonasi yang tidak mereka setujui.

Ancaman lain yang dihadapi Taman Nasional adalah perburuan burung untuk kepentingan komersial. Hal ini banyak terjadi pada spesies darat yang mudah ditangkap dengan jaring, misalnya: *Lorius Garulus*, *Cacatua Alba*, *Eclectus Roratus* dan *Eos Squamata* yang termasuk dalam rumpun keluarga Psittacidae. Mereka banyak ditangkap dan dijual kepada para penadah atau pedagang ilegal (domestik dan internasional). Salah satu yang terkenal adalah *Cacatua Alba* yang ditemukan di pasar perdagangan burung ilegal di Bali, sementara dua jenis lainnya *Eos Squamata* dan *Lorius Garulus* ditargetkan untuk pasar lokal (Widodo, 2005). Mereka diminati karena kemampuan adaptasinya yang tinggi dan kemudahannya untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan (Tabba, Supratman, dan Lis Nurrani. 2016. Distribusi Avifauna di Taman Nasional Aketajawe Lolobata Berdasarkan Zona dan Tipologi Sampul Daratan. Jurnal Wasian, jilid 3 , no. 1, hlm. 25., doi: 10.20886 / jwas.v3i1.891)

Kurangnya kapasitas untuk praktik pertanian berkelanjutan (tidak ada pendekatan permakultur dan tidak ada zona)

Sebagian besar masalah yang diangkat sebelumnya sebenarnya berkaitan erat dengan tidak tersedianya mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan. Kapasitas penduduk untuk mengkreasi mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan masih terbatas. Selama ini mereka masih menjalankan praktik pertanian berpindah. Apalagi, mereka juga masih terbiasa untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat melalui perburuan liar (burung dan spesies lain) kendati mereka memahami bahwa tindakan seperti itu bertentangan dengan hukum. Gambaran demikian merupakan masalah klasik yang kerap IDEP temukan dalam banyak program pengembangan masyarakat dan lingkungan selama 18 tahun terakhir. Tanpa menyediakan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan, masyarakat hampir pasti akan kembali ke praktik-praktik yang eksploitatif.

Kurangnya kapasitas terkait mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan

Ada juga tantangan demografi ketika Pemerintah Halmahera menerapkan program transmigrasi dan kemudian membangun desa transmigrasi. Sebagian besar transmigran ini adalah orang yang unggul dalam pertanian konvensional. Hal ini kemudian menciptakan ketimpangan dalam hal kesejahteraan dan akses ke mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal dan masyarakat asli. Desa-desa (dalam Zona Penyangga) yang disebutkan tadi sebagian besar dihuni masyarakat lokal dan masyarakat asli (Tobelo Dalam) yang telah direlokasi. Pihak pemerintah menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat lokal dilengkapi dengan alat-alat produksi seperti mesin-mesin, tutorial dan perlengkapan lainnya. Namun sayangnya, mereka tidak dibekali dengan pendampingan dan pemantauan dalam hal produksi untuk pasca-panen.

Kurangnya keterampilan petugas lapangan terkait pengorganisasian masyarakat dan kurangnya komunikasi pemerintah lokal terkait keterlibatan dalam proyek

Di sisi lain, Maluku Utara, khususnya kawasan Taman Nasional, memiliki begitu banyak kekuatan dan peluang kerja sama demi konservasi keanekaragaman hayati. Tim TNAL (penjaga hutan) memiliki rencana dan tindakan yang luas dan komprehensif dalam mempromosikan Taman Nasional untuk ekowisata melalui aktivitas pengamatan burung dan aktivitas-aktivitas lain dalam Taman Nasional yang terkait dengan konservasi. Namun demikian, tampaknya aktivitas semacam itu tidak melibatkan komunitas lokal karena lebih banyak dikelola dan dikendalikan tim Taman Nasional. Taman Nasional memang memegang peran besar dalam hal keterlibatan masyarakat dalam Zona Penyangga. Ada beberapa program lokal yang akan mendukung alasan ini. Salah satunya datang dari Departemen Kehutanan Maluku Utara yang ingin mengintegrasikan program ini dengan pengembangan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) mereka yang dimaksudkan untuk mengusahakan mata

pencaharian alternatif dan pendekatan konservasi yang holistik melalui penerapan permakultur dengan cara mengembangkan konsep agro-forestri di zona penyangga dan kawasan hutan masyarakat. Lebih dari itu, IDEP dalam hal ini mendapat dukungan dan pengakuan dari universitas dan lembaga pemerintah untuk membangun mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan di desa-desa yang disebutkan di atas.

IDEP akan melaksanakan program di TNAL berdasarkan pelajaran dan pencapaian yang kami peroleh di Talaud, Sulawesi Utara. Program tiga tahun kami di Talaud dimulai dengan masalah ancaman yang sama terhadap hutan lindung di Kepulauan Talaud dan perburuan ilegal spesies langka Burung Sampiri. Di sana, kami berhasil memperoleh dukungan, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Dukungan, dari pemerintah kabupaten yang telah siap untuk melanjutkan program ini di masyarakat dalam kerjasama dengan BKSDA. Selain itu, dukungan itu juga dilanjutkan pemerintah dengan menetapkan desa-desa dampingan IDEP sebagai desa konservasi. Kabupaten Talaud pada akhirnya menyetujui Peraturan Daerah (PERDA) untuk melindungi Burung Sampiri dan hutan lindungnya sebagai hasil dari advokasi kami melalui program tadi. Bahkan, Pemerintah Kabupaten dengan bangga menetapkan Sampiri sebagai maskot Talaud.

IDEP telah bekerja sama dengan lima desa di Pulau Talaud, dan pada saat ini, setiap desa memiliki beragam mata pencaharian yang bersumber dari kebun mereka di pekarangan rumah dan di dalam kawasan Zona Penyangga. Mereka juga telah menurunkan penggunaan bahan kimia secara signifikan dan melakukan praktik rehabilitasi pada lahan pertanian mereka. Sebanyak 15 hektar lahan mereka sekarang dikelola dengan cara organik dan dari situ mereka telah menerima pendapatan rutin yang signifikan. Dari kebun pekarangan rumah, keluarga-keluarga di lima desa tersebut kini telah mengelola produk lokal hasil panen seperti: Virgin Coconut Oil (VCO), keripik dari singkong dan sayuran, kelapa dan ramuan olahan, dan sayuran segar. Produk-produk kemasan mereka juga telah terdaftar dan memperoleh izin (izin PIRT) dari Dinas Perdagangan setempat. Sebagai dampak dari pendampingan kami, desa-desa ini sekarang dijadikan pemerintah sebagai contoh sukses pengembangan komunitas yang digerakkan masyarakat. Mereka bahkan telah menerima banyak kunjungan belajar dari beberapa elemen pemerintah lokal untuk tujuan replikasi ke desa-desa lain. Istimewanya, kelompok masyarakat di Desa Bengel bahkan telah menerima dana tahunan dari anggaran desa untuk mendukung bisnis mereka.

Di Maluku, pejabat pemerintah dan tim TNAL telah mengetahui dan berkomitmen untuk mendukung rencana kami. Oleh karena itu, kami yakin bahwa program kami di TNAL akan sesukses apa yang kami kerjakan di Talaud. Terutama karena masyarakat di daerah terpencil, berdasarkan pengalaman kami, menemukan bahwa pendekatan permakultur untuk memaksimalkan apa yang mereka miliki di tingkat lokal sebagai praktik yang benar untuk mendukung mata pencaharian mereka.

Tentang Taman Nasional:

<http://aketajawe.com/aketajawe>

https://en.wikipedia.org/wiki/Aketajawe-Lolobata_National_Park

Tentang keanekaragaman hayati di Aketajawe-Lolobata (yang mungkin dapat dilindungi adalah Burung Bidadari Halmahera): <https://www.evernote.com/shard/s663/sh/9449176c-5d95-4ec0-baed-cab3862451c3/860074dfaee4af5edab530e8c2c77e16>

<http://tips-wisata-indonesia.blogspot.co.id/2015/07/taman-nasional-aketajawe-lolobata.html>

10. Kemungkinan Dampak

Dengan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal bertani dan mengembangkan penghasilan yang berkelanjutan menggunakan pendekatan permakultur, ada beberapa hal yang dapat dilihat secara perkembangannya:

1. Pengetahuan masyarakat adat terkait pertanian yang berkelanjutan, pola tanam, serta zonasi pengembangan wilayah permakultur dapat menjadi bekal untuk masyarakat mendapatkan penghidupan yang berlanjut. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk mendukung perkembangan kebun secara organik, masyarakat adat tidak perlu mengeluarkan modal besar, serta mengerahkan sumber daya yang mereka miliki secara efisien - dengan ini masyarakat adat dapat memaksimalkan pengetahuan dan kearifan lokal yang sudah dimiliki, ditambah adanya penghasilan tambahan dan sumber pangan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat menjawab isu pencarian pendapatan alternatif masyarakat adat yang selama ini mencari uang dengan berburu burung paruh bengkok dan membantu tambang emas yang terus merusak lingkungan.
2. Pendekatan dan pendampingan yang dilakukan dapat juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pihak TNAL yang sampai saat ini sedang menjalin diskusi penentuan tapal batas serta kebijakan yang mufakat untuk penggunaan lahan koridor hutan dalam wilayah TNAL. Hal ini dapat menjadi awal yang baik untuk membangun kemitraan yang kooperatif antara masyarakat adat yang sudah didampingi IDEP (dengan asumsi pengetahuan mereka terhadap zonasi konservasi berdasarkan permakultur dan perlindungan terhadap lingkungan) dengan para pemangku kepentingan seperti TNAL, pemerintah Halmahera Timur (sebagai pendukung upaya pengembangan industri rumah tangga), dan lembaga masyarakat lain-nya.

Namun dalam pelaksanaan-nya, ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat adat, ada beberapa hal yang dapat menjadi resiko terkait dengan capaian dan implementasi dalam program ini:

1. Bahwa program ini membutuhkan komitmen dan kinerja yang konsisten dalam pengembangan kebun, sehingga waktu masyarakat adat akan banyak dialokasikan untuk pengembangan kebun rumah tangga. Selama pelatihan masyarakat diharapkan mengikuti kegiatan 100%, di mana kegiatan ini dilaksanakan dari pagi hingga siang/sore dan mengutamakan praktik langsung di kebun masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan energi fisik yang cukup intensif, serta ketelatenan dalam proses pemeliharaan hingga hasil panen.

11. Implementasi Partisipatif

Efforts to gain Free, Prior, and Informed Consent before implementation

Dalam hal ini, Yayasan IDEP pada bulan Maret sudah melaksanakan audiensi dengan pihak pemerintahan dan dinas terkait yang akan bersinggungan dalam pelaksanaan program ini. Dari pertemuan tersebut IDEP mendapatkan surat dukungan dari dinas-dinas pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, BKSDA, dan Taman Nasional Aketajawe Lolobata). Dalam pertemuan ini pihak pemerintahan dan TNAL bersedia untuk membantu dan menyampaikan kepada para pihak desa-desa yang menjadi target penerima manfaat dan dampingan program ini. Sehingga disarankan oleh TNAL bahwa perlu-nya diadakan pertemuan kembali sebelum dilaksanakan program ini, dimana pertemuan ini akan melibatkan para pihak pimpinan desa serta para tetua adat yang ada di Tutuling Jaya dan Dodaga. Maka dari itu, program ini tidak akan berjalan sebelum mendapatkan surat dukungan dan perjanjian bertanda tangan dari pihak pemerintah desa serta

pemimpin adat suku Tobelo Dalam yang mendiami Tutuling Jaya ataupun Dodaga yang akan menjadi penerima manfaat dan masyarakat dampingan dalam program ini.

IDEP mengidentifikasi isu inti ancaman terhadap KBA Maluku Utara sebagai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi Taman Nasional dan bagaimana Taman Nasional dapat benar-benar memperkuat dan menopang mata pencaharian mereka dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu, tidak adanya kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan untuk masyarakat yang tinggal di zona penyangga TNAL. Masalah serupa ditemukan di lokasi program IDEP sebelumnya di Taman Nasional Rinjani di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam kerja IDEP saat ini dengan CEPF di Pulau Karakelang, Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk mengatasi masalah inti, IDEP akan mereplikasi penggunaan pendekatan permakultur dalam melaksanakan proyek di koridor Taman Nasional Akajawe Lolobata, sebuah pendekatan yang telah kami terapkan dalam program kami sebelumnya di seluruh Indonesia. Dengan bekerja sama dengan masyarakat, IDEP juga akan terlibat dengan tim TNAL, lembaga Pemerintah Daerah (Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan), lembaga pendidikan (Politeknik Padamara, Universitas Halmahera) dan LSM yang bekerja pada lingkungan dan konservasi tanah adat (AMAN), untuk memastikan pekerjaan yang kami lakukan di area TNAL mendukung dan sejalan dengan pekerjaan dan sasaran para pemangku kepentingan ini.

Strategi keterlibatan kami dengan berbagai pemangku kepentingan untuk proyek ini adalah:

1) Masyarakat lokal / kelompok, yang akan terlibat dalam program pengambilan keputusan dan implementasi ini. Dari perencanaan, perwakilan dari masyarakat akan terlibat dalam asesmen lapangan dan diskusi-diskusi di desa. Kelompok-kelompok di desa yang diharapkan menggunakan kelompok lain, kelompok pemuda, kelompok penggarap / petani, badan perwakilan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan kelompok terkait lainnya.

2) Pada peningkatan kesadaran tentang konservasi keanekaragaman hayati: IDEP akan terlibat dengan tim TNAL selama pertemuan dan pendampingan kami kepada masyarakat yang tinggal di daerah zona penyangga untuk memperkenalkan konsep permakultur, khususnya tentang bagaimana sistem zonasi permakultur akan memperjelas area produksi dan konservasi di desa mereka. , di mana kawasan konservasi adalah TNAL dan bahwa zona penyangga adalah kawasan produktif yang dapat mereka manfaatkan semaksimal mungkin dengan menggunakan praktik pertanian berkelanjutan. TNAL juga akan menginformasikan fungsi Taman Nasional dan biodiversitasnya dan bagaimana melestarikan keanekaragaman hayati mereka dapat benar-benar memperkuat dan menopang kegiatan mata pencaharian masyarakat. Masyarakat akan memiliki kepastian untuk bekerja di daerah-daerah tertentu untuk mata pencaharian mereka, di mana kawasan-kawasan ini diakui dan dilindungi oleh konsensus antara masyarakat dan pejabat desa. Sementara itu, kawasan konservasi dilindungi tidak hanya oleh tim TNAL tetapi juga oleh masyarakat sekitar, memastikan bahwa tidak ada pihak yang akan mengeksploitasi atau melakukan kegiatan ilegal di hutan konservasi.

3) Pengembangan Kapasitas Partisipatif: pelatihan dan pendampingan akan mencakup para pemangku kepentingan yang akan bekerja langsung dengan masyarakat, seperti: staf lapangan Departemen Pertanian, tim usaha kecil dari Departemen Perdagangan, tim taman nasional, alumni dan mahasiswa dari universitas tetangga . Setelah pelatihan, masyarakat akan bekerja dalam kelompok (satu kelompok per desa) untuk mulai berlatih - perencanaan, perancangan, implementasi - konsep wanatani dan permaculture

4) Mendukung pengembangan bisnis skala mikro dalam produk mata pencaharian alternatif: IDEP akan menghubungkan masyarakat untuk terlibat dan menerima dukungan dari departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian untuk pengembangan produk lokal, memperoleh izin usaha produk kecil (P-IRT), dan memasarkan produk ke toko-toko yang dimiliki oleh departemen Perdagangan (di bandara, di acara produk lokal, dll). Pada awalnya, Universitas akan mendukung pengembangan produk dan kemasan serta akses pasar di ibu kota.

5) Bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan: IDEP akan mengadakan koordinasi awal dan pertemuan perencanaan kegiatan bersama dengan tim TNAL, Universitas, LSM Aman, staf lapangan, Departemen Pertanian, dan departemen Perdagangan pada awal program. Untuk menjaga koordinasi dan memperkuat kerja timbal balik, IDEP akan mendorong pertemuan koordinasi tiga bulanan rutin yang akan diadakan di kantor yang berbeda. Hasil dari pertemuan koordinasi ini adalah agar Pemerintah diberitahu dan mendukung kegiatan mata pencaharian dan konservasi masyarakat yang berkelanjutan.

12. Pendampingan terhadap individu terdampak

Capaian Kunci:

Praktek penghidupan yang lebih kuat dan berkelanjutan menggunakan pendekatan permakultur untuk masyarakat yang tinggal di zona penyangga TNAL, Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2019.

Capaian Program:

- Peta zonasi Permakultur (termasuk kawasan konservasi dalam TNAL disepakati oleh masing-masing komunitas desa dan pemerintah setempat, mencakup total 170 hektar (1/2 dari total wilayah empat desa)
- Masyarakat yang tinggal di zona penyangga Taman Nasional Akajawe Lolobata (TNAL) telah meningkatkan keterampilan dan kapasitas pada agroforestry dimulai dengan rencana jangka panjang agroforestri yang komprehensif dan mulai menerapkan dalam skala awal (15 jam per desa)
- Kelompok masyarakat di setiap desa mampu melakukan pengembangan produk pasca panen untuk setidaknya setengah dari jenis panen mentah mereka dengan akses pasar dan dukungan dari pemerintah setempat
- # hektar KBA di Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) dilestarikan melalui pengelolaan sumber daya bersama oleh tim TNAL, jaringan LSM lokal dan perwakilan masyarakat selama periode proyek

Untuk mencapai capaian yang ditargetkan di atas, IDEP akan menemani masyarakat dalam melakukan kegiatan:

- 1) Kesadaran Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati: kunjungan dan pertemuan penilaian masyarakat, sosialisasi program, FGD masyarakat untuk mengembangkan peta zona permakultur, pembentukan kelompok masyarakat per desa untuk kebun dan pengembangan produk, digitalisasi peta zona permakultur
- 2) Pengembangan Kapasitas Partisipatif: setidaknya 15 perwakilan terpilih dari masing-masing desa akan menerima pelatihan tentang permakultur, agroforestri dan konservasi. Setelah pelatihan, staf lapangan IDEP akan melakukan pendampingan intensif bagi masyarakat untuk mengimplementasikan pengembangan kebun masyarakat; mendorong masyarakat untuk melakukan pertemuan perencanaan desa agroforestri dan konservasi; bersama dengan masyarakat untuk menanam dan mengelola pohon

produktif; mengembangkan satu pembibitan per desa; penanaman pohon untuk konservasi; dan menerapkan agroforestry (hutan pangan berkelanjutan / perhutanan sosial).

3) Mendukung pengembangan usaha skala mikro dalam produk mata pencaharian alternatif: setidaknya 15 perwakilan terpilih dari setiap desa akan menerima pelatihan pengembangan produk pasca panen. Setelah pelatihan, IDEP akan mendampingi masyarakat untuk membuat kelompok kerja dan memperkuat kelompok. Kelompok-kelompok ini kemudian akan memulai perencanaan organisasi, rencana bisnis, pembelian alat untuk mendukung kegiatan produksi; pemrosesan pasca panen, pelabelan dan pengemasan; desain dan media cetak promo untuk mendukung pemasaran; membangun pasar untuk produk lokal; kunjungan mingguan reguler untuk pendampingan dan dukungan.

4) Bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan dan terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi: IDEP akan menjembatani masyarakat dengan pejabat dari Departemen Perdagangan, Kehutanan dan Pertanian untuk menerima dukungan pada pemasaran bersama untuk produk dan kegiatan program lokal. Kegiatan pemantauan dan evaluasi akan membantu IDEP untuk meningkatkan strategi pendampingan kami dan memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di mana masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi IDEP juga.

13. Pelaksanaan Program

IDEP berkantor pusat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk melaksanakan program, pada awalnya IDEP akan mengirimkan Koordinator Program dan Manajer Proyek (yang direkrut dari kantor pusat) untuk bertemu dengan pemangku kepentingan di kota Sofifi / Ternate. Setelah itu IDEP akan membuat kantor perwakilan di Sofifi. Kantor ini bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan program, terutama komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaksanaan program di empat desa dimaksud. Di tingkat desa, IDEP akan menunjuk 2 (dua) orang Tenaga Pendamping Masyarakat yang akan bertugas dan tinggal di perwakilan resort (polisi hutan) yang dapat menjangkau 4 desa dampingan.

Tenaga Pendamping Masyarakat secara rutin akan melakukan pertemuan bulanan di Kantor Pelaksana Program di Sofifi. Manajer Proyek juga akan melakukan kunjungan rutin (sebulan sekali - setiap minggu 1 desa) ke desa-desa lokasi program, berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan berkoordinasi dengan Kantor Pusat IDEP di Bali. Tim inti dari Bali akan datang setiap 2 - 3 bulan sekali untuk pertemuan inti dengan pemangku kebijakan, pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Adapun pelaksana program ini adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat (tim yang berbasis di Bali di kabupaten Gianyar): 4 stafs

1. Ade Andreawan: Direktur Eksekutif

Perencanaan proyek, penilaian, menyetujui perekrutan tim lapangan proyek, tanda akhir pada semua dokumen hukum termasuk kontrak dengan mitra, laporan (naratif dan keuangan) dan hadir atas nama IDEP untuk semua acara nasional / internasional yang terkait dengan Proyek, melakukan pemantauan dan kunjungan evaluasi (jika diperlukan).

2. Sri Mahayuni: Koordinator Program

Perencanaan proyek, perekrutan tim lapangan proyek, pelatih untuk pelatihan kepada penerima manfaat, pengelolaan dan pengawasan intensif untuk kegiatan di lapangan, memantau dan mengawasi pekerjaan staf lapangan, melakukan kunjungan pemantauan dan evaluasi, mengembangkan laporan naratif kepada donor.

3. Sri Handayani: Koordinator Dukungan

Perencanaan proyek, perekrutan tim lapangan proyek, mengelola anggaran dan ikhtisar kegiatan keuangan di lapangan, memeriksa laporan keuangan dan memberikan umpan balik kepada staf lapangan

4. Yosephine Ayu Rembulan: Koordinator RD (Pengembangan Sumber Daya)

Perencanaan proyek, komunikasi dengan donor, meninjau laporan dan menyerahkan kepada donor, melakukan kunjungan pemantauan dan evaluasi (jika perlu)

Kantor Lapangan (tim berbasis Halmahera di Sofifi): 4 orang staf

1 Manajer Lapangan - 100% (sedang dalam proses perekrutan) - berbasis di Sofifi:

Pelaksanaan proyek: menilai dan merekrut petugas proyek, mengelola dan mengawasi pekerjaan petugas proyek, bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, kemitraan dengan mitra lokal, mewakili IDEP di lapangan, menandatangani kontrak dan kesepakatan atas nama IDEP di tingkat lokal, jaringan dengan berbagai kelompok, mengembangkan dan menyerahkan laporan ke Kantor Pusat. IDEP akan merekrut Manajer Lapangan yang dikirim dari Kantor Pusat yang memiliki pengetahuan luas tentang implementasi program dan keterlibatan pemangku kepentingan. Manajer kami akan merekrut dua petugas proyek lokal dari pulau tersebut, kapasitas membangunnya dan membantu mereka untuk melaksanakan pekerjaan pengembangan masyarakat sesuai dengan standar IDEP. Selama proses persiapan tim, Koordinator Program akan mendukung Manajer Lapangan untuk membentuk dan memperkuat tim di bulan pertama dan setengah periode awal proyek.

2 Petugas Proyek - 100% (akan direkrut) - seorang Petugas yang berbasis di Resort Binagara (untuk desa Tintatu dan Tomaros) dan seorang Petugas yang bermarkas di Resort Subaim (untuk desa Tutuling Jaya dan Doddaga)

Pelaksanaan proyek: membuat kerangka waktu dan tujuan kerja, menyampaikan kegiatan seperti yang direncanakan, membantu dan mendukung inisiatif masyarakat dan bekerja, mempersiapkan dan mengelola lokakarya masyarakat, pelatihan dan pertemuan, mewakili IDEP di lapangan, jaringan dengan kelompok lokal di desa tetangga, mengembangkan dan menyerahkan kegiatan lapangan laporan ke Manajer Lapangan.

Satu Staff Administrasi dan Keuangan - 100% (direkrut) - berbasis di Sofifi

Pelaporan keuangan dan admin: membuat kerangka waktu dan tujuan kerja, memastikan prosedur keuangan dan admin sesuai dengan standar IDEP, ikhtisar kegiatan keuangan di lapangan, membuat laporan keuangan dan memberikan umpan balik kepada petugas lapangan, mengembangkan dan menyerahkan laporan keuangan bulanan kepada Manajer Lapangan.

14. Monitoring dan Evaluasi

Manajer Proyek akan melakukan kunjungan pengawasan ke setiap desa untuk mengawasi pekerjaan staff lapangan program setiap bulan. Staff lapangan akan membuat laporan kembali ke kantor (Back to Office) setiap melakukan pendampingan. Setiap bulan, tim lapangan akan memberikan laporan bulanan kepada Kantor Pusat dan pelaporan akan dicek dan dievaluasi oleh Koordinator Program dan Koordinator Support IDEP.

Kantor Pusat IDEP akan memberikan laporan 6 bulanan terhadap pelaksanaan kerangka ini kepada CEPF yang termasuk didalamnya:

- Lokasi, tanggal dan partisipasi masyarakat dalam setiap konsultasi publik.
- Penjelasan mengenai semua bentuk keberatan (bila ada) atau perselisihan serta jalan keluarnya
- Dokumentasi pelaksanaan pengumuman kepada masyarakat

15. Resolusi Konflik dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat mengadukan keberatan atas ketidaksetujuannya terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu atau program ini secara keseluruhan melalui pemerintah desa atau kabupaten selama pelaksanaan program, baik secara informal maupun melalui kegiatan-kegiatan formal misalnya dalam pertemuan desa, lokakarya atau pertemuan para pihak lainnya.

IDEP juga akan menempatkan mekanisme pengaduan masyarakat di dalam setiap produk media (poster, papan nama, flyers, video dokumentasi) yang akan disebar dan diberikan kepada masyarakat.

IDEP juga bisa didatangi langsung ke kantor yang akan disiapkan di Sofifi (alamat menyusul), serta di kantor Pusat IDEP di Bali dengan alamat: Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali.

Selain itu, kami membuat pengumuman dalam Bahasa Indonesia tentang bagaimana menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan program ini dengan cara yang mereka inginkan langsung kepada:

- Gusti Ayu Komang Sri Mahayuni (Sayu), Program Koordinator, HP +62 852-3715-3280, Email: sayu@idepfoundation.org
- Ade Andreawan, Direktur Idep Selaras Alam, HP +62 813-3808-5549, email: ade@idepfoundation.org / info@idepfoundation.org
- Regional Implementation Team, Burung Indonesia, Adi Widyanto HP 62 81511416370, email: a.widyanto@burung.org
- CEPF Executive Director: cepfexecutive@conservation.org
- Bank Dunia di Jakarta; (+62-21) 5299-3000; wbindonesia@worldbank.org

Kami akan berbagi semua keluhan - dan tanggapan yang diusulkan - dengan Tim Implementasi Regional dan Direktur Hibah CEPF dalam waktu 15 hari. Jika penggugat tidak puas setelah menerima tanggapan, mereka dapat mengajukan pengaduan langsung ke Direktur Eksekutif CEPF di cepfexecutive@conservation.org atau melalui pos darat. Jika penggugat tidak puas dengan tanggapan dari Direktur Eksekutif CEPF, mereka dapat mengajukan pengaduan ke Bank Dunia di kantor Bank Dunia setempat.